

Nama : Choirunnisa Tasyania

Npm : 2213053049

Kelas : 2B

Mata Kuliah : Pkn

ANALISIS JURNAL

DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019

Demokrasi mudah ditafsirkan "untuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat" dan untuk rakyat". Namun, agar itu terjadi Makna ini tidak mudah karena demokrasi membutuhkan proses dan tahapan yang panjang penting untuk dilalui, sebagai sebuah proses konsolidasi demokrasi. Seperti Yang Dikatakan Laurence Whitehead (1989), Konsolidasi Demokrasi adalah salah satu pilihan pada dasarnya meningkatkan keterlibatan keseluruhan lapisan masyarakat dari aturan permainan demokrasi. Ini bukan hanya proses politik terjadi di tingkat prosedural institusi dalam politik, tetapi juga pada tingkat sosial. Demokrasi diperkuat oleh para aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (masyarakat politik, masyarakat ekonomi, negara dan masyarakat sipil) dapat mengusulkan kegiatan pilihan dasar demokrasi yang ingin dicapai kekuatan.¹ Dalam konteks Indonesia, proses itu mempengaruhi demokrasi yang sedang berlangsung Beberapa faktor seperti budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan politik.

Proses demokrasi (demokratisasi). relatif dinamis, terutama setelah itu Pemilu 1999. Dinamika, bahkan lebih dengan cepat dan cepat setelah menerapkannya pemilihan presiden langsung sejak tahun 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada), langsung dari tahun 2005. Demokrasi regional merupakan fondasi terpenting perkembangan demokrasi di tingkat nasional. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan terobosan besar sebagai upaya memperdalam demokrasi (demokrasi), yaitu perusahaan menang kelemahan praktik demokrasi yang sebenarnya, terutama ketika menanggapi tuntutan Komunitas lokal.

Pada saat yang sama, proses demokrasi berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga waktu pemilihan presiden langsung) menunjukkan arah yang tidak mudah, mis dalam rangka membangun kualitas pemilihan presiden dan memperdalam demokrasi atau memperkuat demokrasi. Proses ini sangat penting karena semua langkah telah berlalu pemilu mempengaruhi kualitas pemerintahan pengelolaan Terutama pemilihan presiden kualitas memiliki efek positif menuju pemerintahan yang efektif.

Secara umum, ketika menafsirkan demokrasi pemberdayaan rakyat, sistem politik yang demokrasi harus dapat menjamin warga negara masyarakat yang kurang beruntung urutan umumnya.² Pelaksanaan pemilihan presiden pada dasarnya sama



Merupakan kelanjutan dari perwujudan prinsip demokrasi yang meliputi jaminan prinsip-prinsip kebebasan pribadi dan kesetaraan, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak politik. Dalam konteks ini, pemilihan presiden langsung bisa proses demokrasi formal yang merupakan perpanjangan garansi hak-hak politik ini. Oleh karena itu dalam Dalam kajian ini, pemilihan presiden tidak hanya dipandang terbatas hanya pesta demokrasi, tapi itu juga alat untuk proses pendalaman demokrasi Di tingkat nasional. Sebagai alat pendalaman demokrasi, pemilihan presiden adalah usaha kreatif pemerintahan pasca pemilu yang efektif.

Penguatan demokrasi di Indonesia terus berlanjut bervariasi dan tidak bekerja secara teratur karena pilar pentingnya (pemilu, partai politik, masyarakat sipil, media). beroperasi secara efisien dan tidak maksimal, menyukai Sebagai salah satu pilar penting demokrasi, pemilu merupakan hal yang esensial untuk memantau dan meningkatkan manajemen presentasi dewan. Pemilu juga perlu kejujuran, keadilan, keterbukaan dan tanggung jawab Kondisi untuk menciptakan sesuatu itu membutuhkan prasyarat dan komitmen ikuti aturan yang ada Konsolidasi atau proses demokrasi memperdalam demokrasi menjadi lebih sulit ketika melalui elit partai politik dan pemangku kepentingan terkait pilihan menunjukkan perilaku yang tidak ada mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung batas dan tidak peduli tentang nilai-nilai demokrasi yang penting, terutama terkait dengan dengan keterlibatan masyarakat yang nyata, berkualitas kompetisi, kesetaraan politik dan perbaikan tanggung jawab politik. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar dalam kondisi sosial, ekonomi dan politik hukum juga tidak memadai. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi, tetapi juga stabilitas nasional. Khususnya jika pemilihan berlangsung di tengah-tengah divisi media sosial, menyebarkan berita sensasional di media sosial, ujaran kebencian dan merajalela Berita palsu membuat hasil pemilu rentan dengan perselisihan dan konflik.

Beberapa masalah muncul selama ini tahapan pemilihan presiden belum berlalu solusi yang spesifik dan tepat. Banyak politisasi identitas dan kepahitannya Perjuangan untuk suara Muslim, masalah partai politik dan semua pemangku kepentingan pemungutan suara yang tidak melakukannya mampu mengoptimalkan dan memaksimalkan peran penting dengan penuh tanggung jawab, manajemen pemilu yang tidak berfungsi beradaptasi dengan keragaman masyarakat dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan sebuah rumah yang Indonesia perlu segera diperbaiki. Kepercayaan publik netralitas birokrasi minimal, juga menentangnya penyelenggara pemilu dan lembaga penegak hukum hukum Meskipun membangun kepercayaan adalah satu hal suatu keharusan dalam proses pendalaman demokrasi/ memperkuat demokratisasi. Tumbuh rasa saling percaya penyelenggara pemilu, partai politik dan masyarakat merupakan tuntutan terpenting membangun demokrasi yang berkualitas dan mendukung tercapainya stabilitas politik dan keamanan di masyarakat.

Secara teori konflik atau perselisihan dalam pemilu dapat diredam sebagai peserta



pemilu (partai politik), penyelenggara pemilu, lembaga pemerintah dan eksekutif hukum dapat menunjukkan profesionalisme dan independensi, imparsialitas, dan afiliasi komitmen yang tinggi untuk sukses pemilu Proses pendalaman/pemantapan demokrasi demokrasi memegang peranan penting pemangku kepentingan pemilu dan otoritas lain seperti masyarakat sipil: elit/aktor, media dan juga media sosial institusi penelitian Kemandirian, kedewasaan dan partisipasi kekuatan sosial (sosial listrik) sangat diperlukan. masyarakat sipil, misalnya, pengirim harus tetap kritis pemilu dan hasilnya. Media massa bisa reporter berita yang objektif dan berdedikasi kontrol sosial untuk kepentingan rakyat. Tentang semua ini pemangku kepentingan pemilu seperti partai politik politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan Aparat penegak hukum harus bekerja sinergis profesional untuk memulihkan kepercayaan kepada publik tentang hasil pemilu. Hal ini diperlukan untuk keberhasilan atau kegagalan pemilihan, apakah konflik presiden sangat tergantung tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemangku kepentingan ini. Karena itu dapat disimpulkan bahwa yang lebih penting

Kehendak demokrasi yang dibangun melalui pemilu semakin besar kemungkinan penonton akan muncul pemilu yang aman dan damai. Di sisi lain, demokrasi yang lebih prosedural dibangun melalui pemilu bahkan lebih besar kepercayaan publik dan semakin rentan perselisihan/konflik muncul. Sejauh ini, Indonesia sudah mampu mewujudkannya pemilu yang aman dan damai. pemilu 2019 kompleks, kompleksitas yang berbeda cukup tinggi dan hasilnya dipertanyakan menjadi pelajaran yang sangat berharga. pemilu kualitas membutuhkan partai politik dan koalisi partai politik juga memenuhi syarat, itu penting karena pemilu bukan sekedar alat aspirasi, suksesi kepemimpinan yang adil dan kedamaian, tetapi juga pertarungan jaminan sosial nasional dan negara kesatuan republik indonesia. Tantangan yang cukup besar dalam hidup Pilkada serentak 2019 membawa konsolidasi Sulit untuk membangun demokrasi yang berkualitas.

Nilai-nilai demokrasi tidak cukup dalam pemilihan presiden di depan Demokrasi sebagai angka Indonesia, yang terbesar keempat di dunia, sepertinya belum mampu menampilkan dirinya sebagai bangsa yang mempraktikkan demokrasi substantif.

